

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan memiliki banyak dan beragam kegunaan atas catatan standar dan laporan kegiatan keuangan. Secara berkala, laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan terhadap para *stakeholder*. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait dengan posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna untuk pengambilan keputusan para pemakainya.

Pemakaian informasi laporan keuangan sangat membutuhkan pengungkapan laporan keuangan secara cepat dan tepat waktu agar keakuratan laporan keuangan tetap terjaga dan memberikan nilai guna yang tinggi untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan serta untuk memprediksi kinerja perusahaan yang akan datang. Rofika dan Mustika Debby Apsari menyatakan bahwa:

Keterbukaan perusahaan dapat berupa penyampaian informasi perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan secara berkualitas bagi para investor. Informasi yang disampaikan oleh manajemen perusahaan dijadikan sebagai alat analisis dan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Sementara bagi manajemen, keterbukaan informasi dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan manajemen dalam mengelola perusahaan secara profesional sehingga dapat mempengaruhi para investor dalam pengambilan keputusan.

¹ Rofika dan Mustika Debby Apsari, “**Faktor Yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI**”, Jurnal Fakultas Ekonomi, Vol 6 No.2, Oktober 2011, hal 99

Pengungkapan laporan keuangan merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan.

Menurut Sofyan Effendi, *Corporate Governance* merupakan:

Konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pelaporan perusahaan yang lebih transparan bagi pengguna laporan keuangan.²

Prinsip-prinsip dasar *corporate governance* yang berterima umum untuk mencapai *good governance* adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), keadilan (*fairness*). Prinsip *good governance* yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Dengan menerapkan *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan manipulasi manajer. Sehingga kinerja yang dilaporkan merefleksikan keadaan ekonomi perusahaan bersangkutan yang sebenarnya.

Menurut Pasaman Silaban dan Rusliaman Siahaan bahwa:

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) merujuk pada sistem yang mengharuskan perusahaan dikelola dan dikendalikan. Sistem tersebut melintasi beberapa hubungan antara pemegang saham perusahaan, dewan direksi, serta pihak manajemen senior. Hubungan-hubungan ini memberikan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan-tujuan perusahaan dan pengawasan kinerja.

² Sofyan Effendi, "Pengaruh *Corporate Governance* Dan Kualitas Auditor Terhadap Manajemen Laba", Diponegoro Journal Of Accounting, Vol 2, No. 3, hal. 2

Terdapat tiga individu yang menjadi kunci utama keberhasilan tata kelola perusahaan, yaitu: pemegang saham, dewan direksi (*board of directors*), dan para pejabat eksekutif puncak yang dipimpin oleh direktur utama (*Chief Executive Officer, CEO*).³

Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut diantaranya juga mencakup strategi penerapan sistem *good corporate governance* dalam perusahaan. Mekanisme *good corporate governance* meliputi kepemilikan manajerial, dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, keberadaan komite audit, dan dewan komisaris independen.

Indonesia memberikan respon yang baik terhadap perkembangan isu mengenai *good corporate governance*. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya *good corporate governance*. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membentuk suatu komite pada Tahun 1999 yang tugasnya merekomendasikan pedoman umum *good corporate governance* yang pertama, yaitu Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Pembentukan komite ini berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999. Pedoman umum *good corporate governance* telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada Tahun 2006. Pedoman tersebut dipublikasikan sebagai panduan bagi perusahaan di Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip *good corporate governance*, termasuk rekomendasi mengenai keharusan membuat pengungkapan praktek *good corporate governance*.

³ Pasaman Silaban dan Rusliaman Siahaan, **Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi**, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2016, hal.14

Penelitian mengenai pengungkapan *corporate governance* selalu dilakukan setiap tahunnya. Penelitian yang dilakukan meneliti tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang dijadikan sebagai variabel penelitian yaitu leverage, profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang menggunakan leverage sebagai variabel independen. Sebagai contoh penelitian dilakukan oleh Nailun Ahmad Ridho dan Dwi Sulistiani (2014). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dan hasil penelitian ini mendukung penelitian Rofika dan Mustika Debby Apsari (2011). Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Petri Natalia dan Zulaikha (2012), Ichsan Pamungkas dan Dul Muid (2012), Linda Santioso dan Yenny (2012), Noor Laila Fitriani dan Andri Prastiwi (2014), Ida Mulyati, Noor Hikmah dan Ayu Oktaviani (2016) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Leverage digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini karena leverage menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh dana utang atau kreditor yang diukur dengan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER). Semakin tinggi tingkat leverage yang ditentukan perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat pendapatan (*return*) yang diharapkan perusahaan.

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Dalam penelitian Nailun Ahmad

Ridho dan Dwi Sulistiani (2014) menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rofika dan Mustika Debby Apsari (2011), Petri Natalia dan Zulaikha (2012), Ichsan Pamungkas dan Dul Muid (2012), Putranto dan Surya (2013), Ida Mulyati, Noor Hikmah dan Ayu Oktaviani (2016) tidak berpengaruh signifikan.

Tingkat profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan *return on asset* (ROA) karena menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Profitabilitas yang besar dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal di dalam perusahaan. Dengan semakin banyak investor maka tanggungjawab manajemen untuk senantiasa meningkatkan kinerja semakin besar. Rasa tanggungjawab pihak manajemen terhadap para pemegang saham dapat dilakukan dengan penerapan *corporate governance*.

Ida Mulyati, Noor Hikmah dan Ayu Oktaviani (2016) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*, sedangkan penelitian Rofika dan Mustika Debby Apsari (2011) menyatakan sebaliknya.

Pada penelitian ini tingkat likuiditas diukur dengan menggunakan *current ratio* (CR) yaitu dengan membandingkan aktiva lancar dengan utang lancar untuk mengetahui sejauh mana aktiva lancar perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan melunasi utang jangka pendek semakin tinggi pula. Perusahaan dengan kinerja yang lebih tinggi akan cenderung untuk

menyajikan pengungkapan laporan tahunan perusahaan dengan lebih luas karena publik akan memberikan penilaian yang baik atas kinerja perusahaan.

Petri Natalia dan Zulaikha (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance* sehingga mendukung penelitian Rianto Jati Putranto dan Surya Raharja (2013), Nailun Ahmad Ridho dan Dwi Sulistiani (2014). Namun berbeda dengan Ichsan Pamungkas dan Dul Muid (2012) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset perusahaan menggambarkan kekayaan perusahaan. Pada umumnya perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut digunakan penulis sebagai fenomena sehingga peneliti tertarik untuk mencoba meneliti kembali dengan subjek penelitian yang berbeda dan tahun yang berbeda dan berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka judul skripsi ini adalah **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance* Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah leverage, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Governance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Governance*?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Governance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Governance*?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memusatkan penelitian pada pokok permasalahan di atas, dalam penelitian ini yang menjadi subjek pokok adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Tahun 2015-2017. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain leverage, profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan. Sedangkan

variabel dependen yang digunakan yaitu luas pengungkapan *corporate governance*.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai “Faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *Corporate Governance* dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia” memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mendapatkan bukti empiris mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh leverage terhadap luas pengungkapan *Corporate Governance*.
2. Pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan *Corporate Governance*.
3. Pengaruh likuiditas terhadap luas pengungkapan *Corporate Governance*.
4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan *Corporate Governance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dan informasi tambahan mengenai pentingnya penerapan dan pengungkapan *corporate governance*.

2. Bagi calon investor, sebagai bahan pertimbangan dalam untuk mengambil keputusan investasi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai acuan untuk mengembangkan pengungkapan *corporate governance* secara lebih luas.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mencakup pembahasan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang berisi uraian teori pendukung yang menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk mendukung proses penelitian, penyampaian hasil penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang objek penelitian, metode dan desain penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, serta interpretasi data berdasarkan alat dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian, menjelaskan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini dan memberikan saran untuk peneliti berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance*. Hal yang dibahas dalam teori ini adalah antara prinsipal (pemilik dan pemegang saham) dan agen (manajemen). Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara prinsipal dan agen. Inti dari hubungan keagenan adalah terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

Menurut Pasaman Silaban dan Rusliaman Siahaan bahwa:

Hubungan keagenan muncul pada saat satu atau lebih pemilik (pemegang saham) mempekerjakan agen (manajer) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan agen. Pemilik mendelegasikan otorisasi pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Pemilik tidak dapat mengontrol apa yang manajer lakukan, kecuali secara tidak langsung melalui dewan direksi. Pemisahan ini dilakukan tapi juga berbahaya atau dapat menimbulkan masalah. Masalah keagenan timbul akibat dari pemilik memberikan otoritas kepada para manajer sebagai agen pemilik untuk menjalankan perusahaan. Manajer sebagai agen tentu memiliki tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Para manajer mungkin menghindari proyek menarik tetapi beresiko karena khawatir akan keamanan pekerjaannya dari pada memaksimalkan nilai pemegang saham. Masalah keagenan dikatakan terjadi ketika manajer membuat keputusan yang tidak konsisten dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham.⁴

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan

⁴ **Ibid**, hal. 12

teori agensi yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*). Manajer dipercaya oleh pemegang saham untuk bekerja sebaik-baiknya dalam mencapai kepentingan pemegang saham. Namun, pada sisi lain pemisahan seperti ini memiliki segi negatifnya. Amalia Kartini Rini mengemukakan bahwa:

Dalam teori agensi, diasumsikan bahwa masing-masing individu cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Hal ini menimbulkan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sedangkan agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Konflik akan terus meningkat karena prinsipal tidak dapat mengawasi aktivitas agen sehari-hari untuk memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Salah satu cara untuk mengurangi konflik antara agen dan prinsipal ini adalah melalui pengungkapan informasi oleh manajemen (agen), dimana sejalan dengan berkembangnya isu mengenai *corporate governance*. Hal ini akan meningkatkan perhatian terhadap masalah pengungkapan pada aspek *corporate governance* suatu perusahaan.⁵

2.2 *Corporate Governance*

Good corporate governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan

⁵ Amalia Kartini Rini, “Analisis Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2010, hal. 11

stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good governance* pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan *good governance* dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Komite Nasional Kebijakan *Governance*, menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas *good corporate governance* yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas corporate governance lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Tujuan dari diterapkannya *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* maksud dan tujuan *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.3 Luas Pengungkapan *Corporate Governance* Dalam Laporan Tahunan

Laporan tahunan berisi pengungkapan informasi yang dapat membantu *stakeholders* dalam pengambilan keputusan. Informasi yang diungkapkan tidak hanya berupa informasi keuangan saja, tetapi juga berupa informasi non keuangan. Selain digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengungkapan dalam laporan tahunan juga digunakan sebagai bentuk akuntabilitas manajemen atas kinerjanya sebagai pengelola perusahaan kepada investor sebagai pemilik.

Di Indonesia, BAPEPAM telah mengatur bentuk dan isi laporan tahunan yang wajib diungkapkan melalui Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. KEP-431/BL/2012 peraturan X.K.6 Tanggal 01 Agustus 2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan-perusahaan publik. Dalam ketentuan umum bentuk dan isi laporan tahunan, disebutkan bahwa laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.

Hal itu menunjukkan bahwa setiap perusahaan di Indonesia wajib membuat laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari:

- a. ikhtisar data keuangan penting

- b. laporan Dewan Komisaris
- c. laporan Direksi
- d. profil perusahaan
- e. analisis dan pembahasan manajemen
- f. tata kelola perusahaan
- g. tanggung jawab sosial perusahaan
- h. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
- i. surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.

Helen Gernon dan Meek K. Garry menyatakan bahwa:

Istilah pengungkapan dalam arti luas mencakup keluarnya setiap informasi mengenai suatu perusahaan tertentu. Pengungkapan meliputi semua informasi yang tercantum dalam pelaporan tahunan perusahaan, media massa, majalah dan sebagainya. Pengungkapan dapat dibedakan berdasarkan apakah pengungkapan tersebut merupakan pengungkapan wajib atau disarankan, atau pengungkapan sukarela. Banyak perusahaan mengungkapkan informasi yang tidak diwajibkan dan tidak disarankan; artinya, beberapa pengungkapan sesungguhnya merupakan pengungkapan sukarela. Fakta bahwa perusahaan terkadang membuat pengungkapan lebih dari yang disarankan menunjukkan bahwa perusahaan mendapat keuntungan dengan melakukan hal tersebut.⁶

Darrough dalam Amalia Kartini Rini mengemukakan bahwa ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Apabila perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi

⁶ Helen Gernon dan Meek K. Garry, *Akuntansi Perspektif Internasional*, Andi Yogyakarta, 2017, hal. 91 dan 94

secara sukarela, pengungkapan wajib memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.⁷

Menurut Ery Hidayanti tentang definisi tingkat *disclosure* adalah:

Tingkat pengungkapan atas informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau tambahan. Informasi ini menyediakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Informasi penjelasan mengenai kesehatan keuangan dapat juga diberikan dalam laporan pemeriksaan. Semua materi harus diungkapkan termasuk informasi kuantitatif dan kuantitatif yang akan sangat membantu pengguna laporan keuangan.⁸

Di Indonesia, kebijakan mengenai pengungkapan *corporate governance* diatur oleh BAPEPAM. BAPEPAM melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: Kep-431/BL/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan yang memuat uraian singkat mengenai penerapan *corporate governance* perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan tahunan terakhir. Peraturan tersebut memuat 16 *point item* yang terdiri dari pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite manajemen resiko, komite-komite lain yang dimiliki perusahaan, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris, akses informasi dan data perusahaan, etika perusahaan, tanggung jawab sosial, pernyataan penerapan *good corporate*

⁷ Amalia Kartini Rini, *Op.Cit.*, hal 14

⁸ Ery Hidayanti, "Pentingnya Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan Dalam Meminimalisasi Asimetri Informasi", *Jurnal WIGA*, Vol 2, No.2, hal. 23

governance, dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*. Enam belas point item tersebut memuat 93 item pengungkapan yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*.

Natalina dalam penelitian sebelumnya oleh Nailun Ahmad Ridho dan Dwi Sulistiani mengungkapkan bahwa:

Luas pengungkapan *corporate governance* merupakan indeks pengungkapan informasi tata kelola perusahaan serta prinsip-prinsip yang mengatur tentang perusahaan, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diungkapkan dan dikomunikasikan kepada publik dengan transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.⁹

Berdasarkan penelitian Bhuiyan dan Biswas dalam penelitian Amalia Kartini Rini indeks pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPCG} = \frac{\text{Total item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Skor maksimum yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan}}$$

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia 2006 ini diterbitkan dalam kerangka dorongan etika. Pedoman ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun merupakan rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan GCG. Demi kepentingan ini, maka BAPEPAM mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang mengatur tentang standar-standar pengungkapan *corporate governance* yang

⁹ Nailun Ahmad Ridho & Dwi Sulistiani. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Dewan Komisaris Dan Leverage Terhadap Luas Pengungkapan *Good Corporate Governance*”, Jurnal Akuntansi FE UIN, Malang, Vol. 5, No. 1, hal 121

sebaiknya diungkapkan oleh perusahaan. *Item-item* tersebut terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Item Pengungkapan *Corporate Governance*

No.	Klasifikasi	Item Pengungkapan
1.	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai hak pemegang saham. 2. Pernyataan mengenai jaminan perlindungan hak atas pemegang saham perlakuan yang sama terhadap hak pemegang saham. 3. Tanggal pelaksanaan RUPS. 4. Hasil RUPS.
2.	Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota Dewan Komisaris. 2. Status setiap anggota (komisaris independen atau komisaris bukan independen). 3. Latar belakang pendidikan dan karir Dewan Komisaris. 4. Uraian mengenai tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris. 5. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris. 6. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris. 7. Jumlah rapat yang dihadiri. 8. Jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat. 9. Mekanisme pengambilan keputusan. 10. Program pelatihan Dewan Komisaris.
3.	Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing. 2. Uraian mengenai tugas dan tanggungjawab Direksi. 3. Latar belakang pendidikan dan karir anggota Direksi. 4. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggungjawab masing-masing anggota Direksi. 5. Mekanisme pengambilan wewenang. 6. Mekanisme pendelegasian wewenang.

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Direksi. 8. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi. 9. Jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat. 10. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi. 11. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.
4.	Komite Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota Komite Audit. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite Audit. 3. Uraian tugas dan tanggungjawab Komite Audit. 4. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. 5. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Audit. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit. 7. Independensi anggota Komite Audit. 8. Keberadaan piagam Komite Audit.
5.	Komite Nominasi dan Remunerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Riwayat hidup singkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 3. Uraian tugas dan tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi. 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan Komite Nominasi dan Remunerasi. 5. Jumlah kehadiran rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi. 7. Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
6.	Komite Manajemen Resiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota Komite Manajemen Resiko. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota anggota Komite Manajemen Resiko. 3. Uraian tugas dan tanggungjawab anggota Komite Manajemen Resiko. 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh anggota Komite Manajemen Resiko.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Jumlah kehadiran setiap rapat. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan anggota Komite Manajemen Resiko. 7. Independensi anggota Komite Manajemen Resiko.
7.	Komite Tata Kelola Perusahaan (GCG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan Komite GCG. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite GCG. 3. Uraian tugas dan tanggungjawab Komite GCG. 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite GCG. 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite GCG. 7. Independensi anggota GCG.
8.	Komite-komite lain yang Dimiliki oleh Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota Komite. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite. 3. Uraian tugas dan tanggungjawab Komite. 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite. 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite. 7. Independensi anggota Komite.
9.	Sekretaris Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Sekretaris Perusahaan. 2. Riwayat singkat Sekretaris Perusahaan. 3. Uraian mengenai tugas dan tanggungjawab Sekretaris Perusahaan.
10.	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang keberadaan SPI (Satuan Pengawas Internal). 2. Jumlah anggota SPI. 3. Jabatan masing-masing anggota SPI. 4. Uraian mengenai tugas dan tanggungjawab SPI. 5. Uraian mengenai aktivitas SPI selama setahun. 6. Penjelasan mengenai audit internal perusahaan.
11.	Manajemen Resiko Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan.

		2. Upaya untuk mengelola resiko-resiko tersebut.
12.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan. 2. Posisi kasus. 3. Status penyelesaian perkara/gugatan. 4. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.
13.	Akses informasi dan data perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan. 2. Daftar penyebaran informasi ke publik.
14.	Etika Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan mengenai budaya perusahaan yang dimiliki perusahaan.
15.	Pernyataan penerapan GCG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan prinsip-prinsip GCG. 2. Keberadaan pedoman pelaksanaan GCG dalam perusahaan. 3. Kepatuhan terhadap pedoman GCG. 4. Keberadaan Board Manual. 5. Struktur tata kelola perusahaan. 6. Hasil penerapan GCG selama setahun. 7. Audit GCG (jasa atestasi) oleh eksternal auditor.
16.	Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi perusahaan. 2. Misi perusahaan. 3. Nilai-nilai perusahaan. 4. Kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya. 5. Uraian mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan pasar modal. 6. Uraian mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan. 7. Uraian mengenai etika bisnis dalam perusahaan.

Sumber:

1. Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-134/BL/2006
2. Pedoman Umum *Corporate Governance* 2006

2.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

2.4.1 Leverage

Menurut Kasmir, leverage merupakan:

Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan.¹⁰

Leverage menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar tingkat pendapatan (*return*) bagi pemilik perusahaan. Pada umumnya tingkat leverage yang dimiliki perusahaan berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain atau dari satu periode ke periode lainnya. Semakin tinggi tingkat leverage yang ditentukan perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat pendapatan (*return*) yang diharapkan perusahaan. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diharapkan perusahaan, semakin tinggi pula tingkat resiko (*risk*) yang dihadapi perusahaan. Tingkat leverage pada penelitian ini diukur dengan *debt to equity ratio* (DER).

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$$

Muhammad dalam penelitian sebelumnya oleh Nailun Ahmad Ridho dan Dwi Sulistiani menemukan bahwa:

¹⁰ Kasmir, **Pengantar Manajemen Keuangan**: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.112.

Tingkat leverage yang diukur dengan *debt to equity ratio* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate governance*. Total hutang yang akan digunakan adalah total hutang secara keseluruhan tanpa ada perbedaan antara hutang jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan total ekuitas yang digunakan merupakan jumlah ekuitas secara keseluruhan.¹¹

2.4.2 Profitabilitas

Menurut Kasmir profitabilitas merupakan:

Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.¹²

Tingkat profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan *return on asset* (ROA). Profitabilitas merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih (setelah pajak)}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Muhammad dalam penelitian Petri Natalia dan Zulaikha **“Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi. Informasi ini akan digunakan untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan tersebut.”**¹³

Meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan dapat disebabkan oleh meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan dalam menjalankan

¹¹ Nailun Ahmad Ridho & Dwi Sulistiani, *Op. Cit.*, hal 123

¹² Kasmir, *Op.Cit.*, hal.115

¹³ Petri Natalia & Zulaikha “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Governance* Pada Laporan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar dalam LQ-45 Bursa Efek Indonesia)”, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 1, No. 2, hal 3

aktivitas bisnis. Meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan ditandai dengan meningkatnya jumlah dan ragam perusahaan. Bertambahnya sumber pendanaan ini akan memacu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan aktivitas perusahaan sehingga profitabilitas perusahaan akan cenderung naik.

Profitabilitas yang besar dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal di dalam perusahaan. Dengan semakin banyak investor maka tanggungjawab manajemen untuk senantiasa meningkatkan kinerja semakin besar. Rasa tanggungjawab pihak manajemen terhadap para pemegang saham dapat dilakukan dengan penerapan *corporate governance*. Dalam laporan informasi *corporate governance* yang memiliki kualitas yang tinggi, maka pemangku kepentingan akan semakin yakin dengan cara yang ditempuh oleh manajemen. Cara-cara yang dimaksud adalah cara-cara yang memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*), tidak hanya berdasarkan kepentingan perusahaan saja.

2.4.3 Likuiditas

Menurut Arfan Ikhsan et.al “**Rasio likuiditas merupakan aset yang diperdagangkan di pasar aktif sehingga dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang berlaku.**”¹⁴

Pendapat lain mengatakan bahwa arti likuiditas adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk melunasi utang-utang yang segera harus

¹⁴ Arfan Ikhsan, et.al., **Analisa Laporan Keuangan**, Cetakan Pertama, Madenatera, Medan, 2016, hal 74..

dibayar (*current liabilities*) dengan menggunakan harta lancarnya. Pada umumnya, tingkat likuiditas suatu perusahaan ditunjukkan dalam angka-angka tertentu, seperti; angka rasio cepat, angka rasio lancar, dan angka rasio kas.

Pada penelitian ini tingkat likuiditas diukur dengan menggunakan *current ratio* (CR) yaitu dengan membandingkan aktiva lancar dengan utang lancar.

$$CR = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Perusahaan dengan rasio likuiditas tinggi atau yang secara keuangan kuat akan mengungkapkan laporan keuangannya dengan lebih luas daripada perusahaan yang secara keuangan lemah. Perusahaan dengan kinerja yang lebih tinggi akan cenderung untuk menyajikan pengungkapan laporan tahunan perusahaan dengan lebih luas karena publik akan memberikan penilaian yang baik atas kinerja perusahaan.

2.4.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Pada umumnya perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aktiva dari perusahaan sampel.

$$\text{Size perusahaan} = \ln (\text{Total Aset})$$

Perusahaan dengan ukuran lebih besar cenderung memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan para pemangku kepentingan. Hubungan yang lebih kompleks ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah, jenis, dan tuntutan

pemangku kepentingan. Dengan meningkatnya kompleksitas tersebut, maka perusahaan berusaha menyediakan informasi-informasi yang relevan. Selanjutnya, sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa setiap keputusan, kepentingan, dan aktivitas bisnis perusahaan dipengaruhi sekaligus mempengaruhi pemangku kepentingan, maka perusahaan yang memiliki hubungan lebih kompleks akan mempunyai tuntutan yang lebih besar. Untuk mengakomodasi tuntutan-tuntutan tersebut, maka perusahaan akan mengungkapkan informasi *corporate governance* yang lebih luas.

Ichsan Pamungkas dan Dul Muid mengungkapkan bahwa:

Dalam teori agensi dikatakan terdapat *information asymmetric* antara agen dan prinsipal. Dengan semakin besarnya ukuran perusahaan, maka peranan praktik *corporate governance* semakin dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan informasi antar agen dan prinsipal. Sejalan dengan hal tersebut, pemegang saham melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap manajemen sehingga mengakibatkan tingginya penilaian *corporate governance* kepada perusahaan.¹⁵

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* sudah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rianto Jati Putranto dan Surya Raharja (2013) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, kepemilikan dispersi, profitabilitas, ukuran dewan komisaris dan kualitas audit. Sampel yang

¹⁵ Ichsan Pamungkas dan Dul Muid, **Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Good Corporate Governance Rating***, Diponegoro Journal Of Accounting, Vol.2, No.3, 2012, hal 3

digunakan dalam penelitian ini adalah 64 perusahaan yang secara konsisten terdaftar sebagai perusahaan manufaktur periode 2008-2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan, kepemilikan dispersi berpengaruh positif secara signifikan, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Petri Natalia dan Zulaikha (2012) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah independensi komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan klasifikasi industri (pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, *property and real estate*, infrastruktur, utilitas transportasi, keuangan dan perdagangan jasa dan investasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi komite audit berpengaruh positif secara signifikan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan, profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan, leverage tidak berpengaruh secara signifikan dan klasifikasi industri berpengaruh sebagian artinya industri pertambangan, keuangan, infrastruktur, utilitas, dan transportasi berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate governance*, sedangkan kelompok industri lain tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate governance*.

Ichsan Pamungkas dan Dul Muid (2012) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *good corporate governance rating*.

Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini antara lain profitabilitas, konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan, umur perusahaan, negara operasional dan nilai perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa profitabilitas dan negara operasional berpengaruh positif namun tidak signifikan, kepemilikan saham, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan nilai perusahaan berpengaruh positif dan signifikan, leverage dan pertumbuhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

Ida Mulyati, Noor Hikmah dan Ayu Oktaviani (2016) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *good corporate governance* dalam laporan tahunan BUMN. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah leverage, profitabilitas, likuiditas, tipe auditor dan komisaris independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh leverage, profitabilitas dan komisaris independen belum bisa disimpulkan, sementara likuiditas dan tipe auditor berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Rofika dan Mustika Debby Apsari (2011) melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah basis perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, proporsi kepemilikan saham publik, reputasi kantor akuntan publik dan likuiditas. Hasil penelitian membuktikan bahwa basis perusahaan, profitabilitas, proporsi kepemilikan saham publik, reputasi KAP dan likuiditas tidak berpengaruh

signifikan, sedangkan ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Nailun Ahmad Ridho dan Dwi Sulistiani (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris dan leverage terhadap luas pengungkapan *good corporate governance* pada perusahaan manufaktur. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris dan leverage, sedangkan indeks pengungkapan *corporate governance* dihitung dengan menggunakan perbandingan antara total item yang diungkapkan perusahaan dengan skor maksimal yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* sedangkan profitabilitas dan leverage berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Amalia Kartini Rini (2010) melakukan penelitian tentang analisis luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan publik. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini antara lain besaran perusahaan, umur *listing* perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional dan ukuran dewan komisaris. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa besaran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*, sedangkan umur *listing* perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris tidak menunjukkan pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Independen	Hasil
1.	Rianto Jati Putranto dan Surya Raharja (2013)	<p>Independen: Ukuran perusahaan, Kepemilikan dispersi, Profitabilitas, Ukuran dewan komisaris dan Kualitas audit.</p> <p>Dependen: Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i></p>	<p>a. Ukuran perusahaan, profitabilitas dan kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan,</p> <p>b. Kepemilikan dispersi dan ukuran dewan komisaris, berpengaruh positif secara signifikan.</p>
2.	Petri Nathalia dan Zulaikha (2012)	<p>Independen: Independensi komite audit, Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Klasifikasi Industri (pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, <i>property and real estate</i>, infrastruktur, utilitas, dan transportasi, keuangan, dan perdagangan dan jasa investasi).</p> <p>Dependen: Pengungkapan</p>	<p>a. Komite audit berpengaruh positif secara signifikan,</p> <p>b. Ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh secara signifikan,</p> <p>c. Klasifikasi industri berpengaruh sebagian (industri pertambangan, keuangan, infrastruktur, utilitas dan transportasi berpengaruh sedangkan industri lainnya tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan <i>Corporate Governance</i>).</p>

		<i>Corporate Governance</i>	
3.	Ichsan Pamungkas dan Dul Muid (2012)	Independen: Profitabilitas, konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan, umur perusahaan, negara operasional dan nilai perusahaan. Dependen: <i>Good Corporate Governance</i> rating	a. Profitabilitas, leverage, pertumbuhan dan negara operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap GCG rating, b. Konsentrasi Kepemilikan dan nilai perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap GCG rating, c. Ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap GCG rating,
4.	Ida Mulyati, Noor Hikmah dan Ayu Oktaviani (2016)	Independen: Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, Tipe auditor dan Komisaris Independen. Dependen: Luas pengungkapan <i>good corporate governance</i>	a. Leverage, profitabilitas dan komisaris independen belum bisa disimpulkan, b. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i> , c. Tipe auditor berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i> .
5.	Rofika dan Mustika Debby Apsari (2011)	Independen: Basis perusahaan, Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan saham publik, Kantor akuntan publik dan	a. Basis perusahaan, Profitabilitas, kepemilikan saham publik, reputasi KAP dan Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan,

		Likuiditas. Dependen: Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan	b. Ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan,
6.	Nailun Ahmad Ridho dan Dwi Sulistiani (2014)	Independen: Ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan leverage. Dependen: Luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	a. Ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i> , b. Profitabilitas dan leverage berpengaruh terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i> ,
7.	Amalia Kartini Rini (2010)	Independen: Besaran perusahaan, umur <i>listing</i> perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional dan ukuran dewan komisaris. Dependen: Luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	a. Besaran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i> , b. Umur <i>listing</i> perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional dan ukuran dewan komisaris tidak menunjukkan pengaruh terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

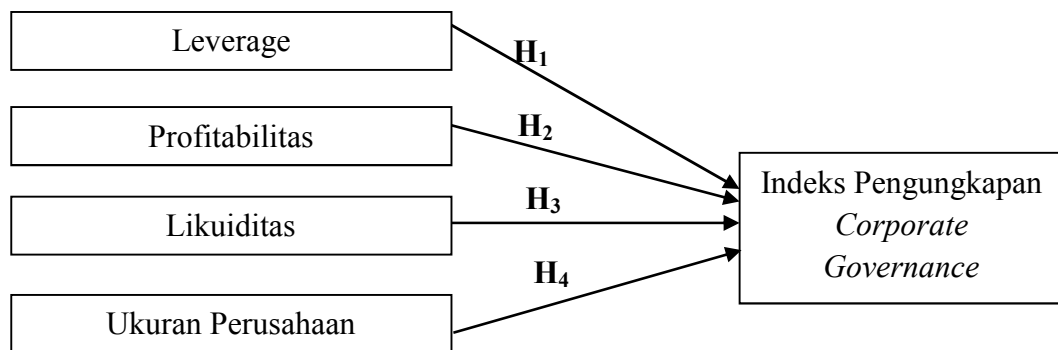
2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Dalam penelitian ini, akan diuji faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan

manufaktur di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yaitu luas pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan perusahaan, baik pengungkapan wajib maupun sukarela. Variabel independen terdiri dari empat variabel, yaitu leverage, profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka model kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Penelitian



2.7 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori yang digunakan dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pembahasan terperinci mengenai pengembangan hipotesis disajikan sebagai berikut:

2.7.1 Pengaruh Leverage Terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (utang) secara efektif sehingga dapat memperoleh penghasilan yang optimal.

Merujuk pada teori agensi, pemegang saham pada prinsipal tertentu mengharapkan pengembalian atas investasi yang mereka lakukan. Tingginya rasio utang perusahaan akan mengakibatkan prinsipal melakukan tekanan kepada manajemen sebagai agen untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar rasio utang semakin berkurang. Tekanan dari pihak prinsipal akan memaksa manajemen untuk menerapkan konsep *good corporate governance* secara lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nailun Ahmad Ridho dan Dwi Sulistiani (2014) mengemukakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, semakin luas pengungkapan yang dilakukan perusahaan karena semakin besarnya kewajiban perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi kreditur jangka panjang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Leverage berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.7.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Profitabilitas menggambarkan kinerja perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tingginya rasio profitabilitas perusahaan, menunjukkan semakin tingginya kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan semakin baik kinerja perusahaannya. Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih berani mengungkapkan laporan keuangan. Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nailun Ahmad Ridho dan Dwi Sulistiani (2014) mengemukakan bahwa profitabilitas terbukti berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : Profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.7.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Likuiditas suatu usaha bisnis didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo. Kesehatan suatu perusahaan yang dicerminkan dengan tingginya rasio likuiditas (diukur

dengan *current ratio*) diharapkan berhubungan dengan luasnya tingkat pengungkapan.

Pengungkapan dapat dilakukan dengan mengungkapkan informasi keuangan dalam laporan keuangan dan dapat pula dengan melakukan pengungkapan informasi non keuangan dalam laporan tahunan. Pengungkapan *good corporate governance* dilakukan sebagai upaya meyakinkan pemangku kepentingan bahwa perusahaan telah dikelola sesuai peraturan dan penurunan likuiditas bukan disebabkan oleh tata kelola yang buruk.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Mulyati, Noor Hikmah dan Ayu Oktaviani (2016) mengemukakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : Likuiditas berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.7.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Perusahaan dengan ukuran lebih besar cenderung memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan para pemangku kepentingan. Hubungan yang lebih kompleks ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah, jenis, dan tuntutan pemangku kepentingan. Dengan meningkatnya kompleksitas tersebut, maka perusahaan berusaha menyediakan informasi-informasi yang relevan.

Selanjutnya, sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa setiap keputusan, kepentingan, dan aktivitas bisnis perusahaan dipengaruhi sekaligus mempengaruhi pemangku kepentingan, maka perusahaan yang memiliki hubungan lebih kompleks akan mempunyai tuntutan yang lebih besar. Untuk mengakomodasi tuntutan-tuntutan tersebut, maka perusahaan akan mengungkapkan informasi *corporate governance* dengan lebih luas.

Dalam teori keagenan dikatakan bahwa terdapat *information asymmetric* antara agen dan prinsipal. Dengan semakin besarnya ukuran perusahaan, maka peranan dari praktik *corporate governance* semakin dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara agen dan prinsipal. Sejalan dengan hal tersebut, pemegang saham melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap manajemen sehingga mengakibatkan tingginya penilaian *corporate governance* dalam perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ichsana Pamungkas dan Dul Muid (2012) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan manufaktur secara berturut-turut yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015 sampai 2017 atau dapat dilihat pada situs resminya yaitu www.idx.co.id.

3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 sampai 2017. Jumlah populasi pada Tahun 2017 sebanyak 143 perusahaan yang terdiri dari 3 sektor yaitu industri dasar dan kimia, industri barang konsumsi dan aneka industri.

3.2.2 Sampel

Menurut Juliansyah Noor pengambilan sampel (*sampling*) adalah:

Proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi.¹⁶

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*.

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel representatif. Kriteria pemilihan sampel antara lain:

1. Perusahaan yang secara berturut-turut menyediakan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 sampai 2017.
2. Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah, karena jika menggunakan mata uang asing maka akan terjadi perbedaan penilaian kinerja keuangan yang disebabkan oleh perbedaan kurs saat ini dengan kurs yang diteliti yaitu tahun 2015 sampai 2017.
3. Perusahaan yang mengalami keuntungan (tidak mengalami kerugian pada tahun 2015 sampai 2017), karena salah satu dari variabel penelitian adalah profitabilitas.
4. Perusahaan mengungkapkan informasi tentang tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam annual report, yaitu data yang diperlukan untuk mendeteksi pengungkapan *corporate governance*.

Berdasarkan kriteria di atas, maka didapat jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian ini sebanyak 45 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Daftar Perusahaan Manufaktur yang menjadi Sampel Penelitian Periode 2015-2017

No.	Kode	Nama Perusahaan
1.	ADES	PT. Akasha Wira International Tbk

¹⁶ Juliansyah Noor, **Metodologi Penelitian**: Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal.148

2.	ALDO	PT. Alkindo Naratama Tbk
3.	AMFG	PT. Asahimas Flat Glass Tbk
4.	APLI	PT. Lifestyle Intra Tbk
5.	ARNA	PT. Arwana Citramulia Tbk
6.	ASII	PT. Astra International Tbk
7.	AUTO	PT. Astra Otoparts Tbk
8.	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
9.	CPIN	PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk
10.	DPNS	PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk
11.	DVLA	PT. Darya-Varia Labotaria Tbk
12.	EKAD	PT. Ekadharma Internasional Tbk
13.	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk
14.	HMSP	PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
15.	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
16.	IGAR	PT. Kagoie Igar Jaya Tbk
17.	IMPC	PT. Impack Pratama Industri Tbk
18.	INAI	PT. Indal Aluminium Industry Tbk
19.	INCI	PT. Intan Wijaya Internasional Tbk
20.	INDS	PT. Indospring Tbk
21.	INTP	PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk
22.	ISSP	PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
23.	JECC	PT. Jembo Cable Company Tbk
24.	JPFA	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
25.	KBLI	PT. KMI Wire and Cable Tbk
26.	KBLM	PT. Kabelindo Murni Tbk
27.	KDSI	PT. Kedawung Setia Industrial Tbk
28.	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk
29.	LMSH	PT. Lionmesh Prima Tbk
30.	MERK	PT. Merck Tbk
31.	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk
32.	RICY	PT. Ricky Putra Globalindo Tbk
33.	SCCO	PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
34.	SIDO	PT. Sido Muncul Tbk
35.	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk
36.	SMCB	PT. Holcim Indonesia Tbk
37.	SMGR	PT. Semen Indonesia Tbk
38.	SMSM	PT. Selamat Sempurna Tbk
39.	TALF	PT. Tunas Alfin Tbk
40.	TCID	PT. Mandom Indonesia Tbk
41.	TOTO	PT. Surya TOTO Indonesia Tbk
42.	TSPC	PT. Temppo Scan Pacific Tbk
43.	ULTJ	PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
44.	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk
45.	WIIM	PT. Wismilak Inti Makmur Tbk

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

Menurut Juliansyah Noor, “**Variabel dependen atau *dependent variable* merupakan faktor utama yang ingin dijelaskan atau diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, biasa dinotasikan dengan Y.**”¹⁷

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu luas pengungkapan corporate governance pada laporan tahunan perusahaan manufaktur. Luas pengungkapan *corporate governance* merupakan indeks pengungkapan informasi tata kelola perusahaan serta prinsip-prinsip yang mengatur tentang perusahaan, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diungkapkan dan dikomunikasikan kepada publik dengan transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

Metode yang digunakan untuk mengukur variabel dependennya adalah dengan mengukur indeks pengungkapannya. Indeks adalah sebuah rasio yang pada umumnya dinyatakan dalam persentase yang mengukur satu variabel pada kurun waktu / lokasi tertentu, relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau lokasi lainnya. Cara mengukur yang telah dibentuk tersebut adalah dengan mengaplikasikan indeks tidak tertimbang dengan menggunakan nilai dikotomis, yaitu nilai 1 untuk *item* yang diungkapkan dan nilai 0 untuk *item* yang tidak diungkapkan. *Item-item* pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan dalam Peraturan X.K.6 Nomor: Kep-431/BL/2012 dan Pedoman Umum Penerapan Good Corporate Governance Indonesia. Tabel pengungkapan tersebut terdiri dari 16 klasifikasi yang kemudian dibagi lagi menjadi 93 item seperti yang tercantum dalam Tabel 2.1 pada bab II.

¹⁷ **Ibid**, hal 49

Berdasarkan penelitian Bhuiyan dan Biswas dalam penelitian Amalia Kartini Rini indeks pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPCG} = \frac{\text{Total item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Skor maksimum yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan}}$$

3.3.2 Variabel Independen

Menurut Juliansyah Noor, Variabel independen atau *independence variable* merupakan:

Sebab yang diperkirakan dari beberapa perubahan dalam variabel terikat, biasanya dinotasikan dengan simbol X. Dengan kata lain, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terikat.¹⁸

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Leverage

Leverage adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh dana utang atau kreditor. Penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* sebagai sampel ukur yaitu dengan membagi total utang dengan total modal.

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$$

2. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA) yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset perusahaan.

¹⁸ *Ibid*, hal. 48

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih (setelah pajak)}}{\text{Total Aset}}$$

3. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya, yaitu; utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan lain-lain. Pengukuran likuiditas dalam penelitian ini menggunakan *Current Ratio* (CR) yaitu perbandingan antara aset lancar dengan hutang lancar.

$$\text{CR} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

4. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan nilai besar kecilnya suatu perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aktiva dari perusahaan sampel.

$$\text{Size perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk kepentingan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Menurut Moh. Nazir **“Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.”**¹⁹

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data empiris dan studi pustaka. Pengumpulan data empiris dilakukan dengan

¹⁹ Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Ghala Indonesia, 2005, hal. 174

mengumpulkan sumber data yang dibuat oleh perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan. Studi pustaka menggunakan berbagai literatur, seperti jurnal, artikel dan literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan sama sekali tidak menarik inferensial atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Menurut Imam Ghozali, bahwa:

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).²⁰

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mean (rata-rata), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi untuk mendeskripsikan variabel penelitian.

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kuantitatif dengan alat regresi linear berganda. Hal ini dikarenakan data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dan mempunyai variabel independen lebih dari satu. Analisis regresi linear

²⁰ Imam Ghozali, **Aplikasi Analisis Multivariete**, Edisi 8: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016, hal.19

berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji leverage, profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Model yang digunakan untuk menguji variabel-variabel terhadap pengungkapan *corporate governance* dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$IPCG = \beta_0 a + \beta_1 DER + \beta_2 ROA + \beta_3 CR + \beta_4 LNASET + \varepsilon$$

Keterangan:

IPCG : Indeks Pengungkapan *Corporate Governance*

DER : Tingkat Leverage

ROA : Tingkat Profitabilitas

CR : Tingkat Likuiditas

LNASET : Ukuran Perusahaan

a : Konstanta

β : Koefisien Regresi

ε : Kesalahan Residual

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan teknik regresi linear berganda, model regresi harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Apabila ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Syarat asumsi klasik tersebut agar menjadi model persamaan estimasi yang baik, yaitu:

1. Error menyebar normal atau data berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan memiliki ragam (*variance*) tertentu yang diketahui melalui uji normalitas.

2. Tidak terjadi heteroskedastisitas pada ragam eror sehingga bersifat homoskedastisitas.
3. Tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas yang diketahui melalui uji multikolinier.
4. Error tidak mengalami autokorelasi (error tidak berkorelasi dengan diri sendiri).

3.5.3.1 Uji Normalitas

Menurut Juliansyah Noor “**Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak**”.²¹ Uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal.

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik.

a. Analisis grafik

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Analisis statistik

Uji yang digunakan adalah uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (KS). Dasar pengambilan keputusan pada analisis *Kolmogorov-Smirnov Z* (1-Sample K-S) adalah apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0.05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti

²¹ Juliansyah Noor, **Op.Cit.**, hal. 174

data residual tidak terdistribusi secara normal. Sedangkan apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0.05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali, **“Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).”**²² Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel bebas. Cara yang dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya, *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 .

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.

²² Imam Ghozali, **Op. Cit.**, hal. 103

Menurut Ghozali dalam Amalia Kartini Rini untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan residualnya. Dasar untuk menganalisis grafik plot adalah:

1. **Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.**
2. **Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.**²³

3.5.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi sehingga model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi secara umum dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa nilai DW terletak diantara batas atas atau *upper bound* (du) dan $(4-du)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada autokorelasi positif.
- b. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau *lower bound* (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol yang berarti ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai DW lebih besar dari pada batas bawah atau *lower bound* ($4-dl$), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol yang berarti ada autokorelasi negatif.

3.5.4 Pengujian Hipotesis

²³ Amalia Kartini Rini, **Op.Cit.**, hal. 42

Penelitian ini menguji hipotesis-hipotesis dengan menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression*). Metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal.

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) dan uji koefisien determinasi (R^2).

3.5.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jika signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Jika signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi berarti semakin besar kemampuan variabel independen

dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti semakin kecil kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen atau sangat terbatas.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam praktiknya, ukuran yang digunakan untuk menilai koefisien determinasi adalah nilai *Adjusted R²*. Tidak seperti nilai R^2 yang dapat menimbulkan bias, nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

